

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Tujuan;

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan telah disusun di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi tertuang di dalam Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Secara harpiah, tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan untuk pencapaian target dan sasaran pada RPJMD yang tertuang di dalam Renstra Dinas. Bedanya untuk RPJMD periode 2024-2026 tidak ada visi dan misi kepala daerah terpilih tetapi menjalankan visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi umum Pendidikan dalam upayanya untuk mengkristalkan peranan pendidikan dengan gambaran umum sebagai berikut :

a) Akses Pendidikan

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu dan biaya. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis Selanjutnya juga sangat diperlukan meningkatkan angka partisipasi sekolah terutama pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus seperti anak rimba, anak nelayan dan anak yang berkonflik dengan hukum serta dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin di dalam

memperoleh akses pendidikan. Untuk akses jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). sederajat masih jauh dari ketuntasan sehingga pengukuran akses masih menggunakan pengukuran dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) sedangkan untuk akses Sekolah Menengah Kejuruan untuk wilayah-wilayah tertentu belum maksimal sehingga diperimbangkan untuk pendirian SMA/SMK satu atap

b) Partisipasi Pendidikan Lintas Sektor

Selain berdasarkan kelompok ekonomi, angka partisipasi pendidikan

juga dipengaruhi oleh faktor gender dan disabilitas. Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan gender menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki probabilitas sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, meskipun perbedaan antara keduanya tidak pernah melebihi 2% (dua persen). Perbedaan ini jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antar kelompok ekonomi dan perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus. Mempertimbangkan capaian isu lintas sektor ini, dilaksanakan dengan 2 (dua) program afirmasi untuk menysasar kelompok ekonomi termiskin dan juga anak berkebutuhan khusus. Program pembiayaan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar sekolah/kuliah, afirmasi pendidikan menengah (Adem) dan afirmasi pendidikan tinggi (ADik). Sementara itu program afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus dapat berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa afirmasi bagi kelompok ekonomi termiskin

c) Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan sangat erat kaitannya dengan akreditasi dan nilai hasil assesmen nasional yang tertuang di dalam raport mutu pendidikan daerah. Dalam penilaian assesmen nasional terdiri atas penilaian assesmen siswa antara lain nilai literasi, numersi dan survei lingkungan baik guru dan kepala sekolah, pendapatan lulusan berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan SMK yang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan tinggi vokasi

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat

d) Kondisi Pendidik

Ketersediaan pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran. Saat ini kekurangan pendidik PNS sangat dirasakan penyebabnya adalah pembatasan perekrutan pendidik namun saat ini telah diupayakan perekrutan pendidik melalui jalur P3K serta juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemerataan pendidik. Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas pendidik dengan memperkuat mekanisme pelatihan guru, penajaman standar kompetensi guru melalui guru penggerak

e) Kebekerjaan Lulusan

Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam menganalisis keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat kebhkerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan, jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang lebih baik daripada jalur pendidikan tinggi vokasi.

Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspektif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari satuan pendidikan

Isu lain yang terkait kebhkerjaan lulusan pendidikan SMK adalah adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki tingkat kebhkerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan

kompetensi dasar dan penanaman karakter abad 21 terutama untuk mengatasi kebekerjaan tamatan SMK pada dunia usaha dan dunia insdustri

f) Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan bahwa 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan untuk pendidikan, lebih dari 60% (enam puluh persen) anggaran tersebut adalah anggaran yang dikelola oleh daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah melalaui dana alokasi khusus baik DAK fisik maupun non fisik

2. Sasaran;

Dari point diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas Pendidikan mengarah pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan khususnya bagi siswa miskin dan kurang mampu untuk memeperoleh pendiidkan yang layak, akses pendidikan di wilayah terpenci;;
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pendidikan di Sumatera Selatan;

3. Peningkatan mutu pendidikan yang berpedoman 8 (delapan) standar pendidikan dalam dalam pencapaian nilai akreditasi minimal B;
4. Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan baik Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Peningkatan kualitas vokasi
6. Peningkat pelayanan pendidikan khusus (SLB) lewat pendidikan inklusi serta pelaksanaan layanan khusus
7. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah dan Khusus;
8. Mewujudkan Merdeka Belajar yaitu perubahan terhadap mekanisme ujian nasional menjadi assesment nasional, perubahan terhadap penjaminan mutu pendidikan menjadi rapor mutu pendidikan, perubahan pelaksanaan kurikulum dari kurikulum K-13 ke kurikulum merdeka, penyesuaian kebijakan dana BOS, pelaksanaan guru penggerak, sekolah penggerak, SMK pusat keunggulan, perluasan beasiswa Lembaga pengelola pendidikan, Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran disusun untuk mengukur keberhasilan suatu pekerjaan, serta untuk mempermudah mengintervensi terhadap permasalahan yang akan dihadapi.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan telah menentukan sasaran untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan yaitu Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan. Dalam pencapaian visi tersebut, Dinas Pendidikan dengan seluruh sumber daya yang ada dari pimpinan sampai dengan jajaran di bawahnya berkoordinasi dan berkonsolidasi agar visi dan misi tersebut terlaksana dengan baik dan rumusan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan waktu yang ditentukan baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2024-2026

dengan sasaran sebagai berikut :

1. Berkurangnya orang miskin melalui pendidikan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya siswa miskin yang memperoleh layanan pendidikan gratis yang memiliki potensi akademik agar dapat mengubah miskin turunan melalui pendidikan

2. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan di Sumatera Selatan, dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain :
 - a. Meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah;
 - b. Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah;
 - c. Meningkatnya Angka partisipasi murni (APM);
 - d. Meningkatnya angka partisipasi;
 - e. Meningkatnya sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi;
 - f. Meningkatnya jumlah SMK pusat keunggulan
 - g. Meningkatnya Jumlah Sekolah Penggerak
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
 - a. Peningkatan akreditasi sekolah
 - b. Peningkatan pendirian LSP-P1
 - c. Peningkatan kualitas vokasi
 - d. Penyelarasan kurikulum SMK dengan IDUKA
 - e. Meningkatnya rapor mutu pendidikan
 - f. Meningkatnya sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka
4. Meningkatkan kualitas SDM baik SDM pendidikan maupun SDM siswa yang kompeten, dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
 - a. Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Meningkatnya Pendidik yang menjadi Guru Penggerak;
 - c. Meningkatnya Prestasi Siswa di tingkat Nasional.
 - d. Meningkatnya Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi tingkat nasional
 - e. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
5. Pemenuhan capaian SPM Pendidikan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memastikan layanan bagi siswa miskin yang rentan putus sekolah baik untuk jenjang pendidikan menengah (16-18 tahun)
 - b. Memastikan layanan bagi siswa miskin yang rentan putus sekolah baik untuk jenjang khusus (4-18 tahun)

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN:
- a) Belanja Perangkat Daerah;
- Tahun 2025 Dinas pendidikan mendapatkan anggaran sebesar Rp 2.868.880.713.669, dengan penjabaran sebagai berikut :
- ❖ Belanja Operasi sebesar Rp 2.702.509.810.043, dengan penjabaran sebagai berikut :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp 1.886.942.028.400
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 541.597.381.753
 - Belanja Hibah sebesar Rp 273.970.399.890
 - ❖ Belanja Modal sebesar Rp 166.370.903.626, dengan penjabaran sebagai berikut :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 92.318.642.536
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 31.770.938.110
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 85.000.000
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 42.196.322.980
- b) Program dan Anggaran APBD;
- Dinas Pendidikan untuk tahun 2025 untuk program sebanyak 4 Program, 15 Kegiatan dan 81 Sub kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.848.439.239.735
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 705.180.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.600.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	417.580.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.838.866.056.125
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.497.154.625
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.243.491.500
6	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.000.000
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.500.000.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	170.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	160.660.000
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	49.750.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	516.634.260
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	153.664.000
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	115.600.000
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	159.090.260
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	88.280.000
IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	44.000.000
15	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	44.000.000
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.094.947.500
16	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	205.145.000
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	889.802.500
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	635.210.000
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.000.000
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.500.000
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.210.000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.500.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	923.700.000
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	923.700.000
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.361.550.000
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.245.200.000
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.350.000
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.228.461.850
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	547.920.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.435.600
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.673.106.250
X	Peningkatan Pelayanan BLUD	63.500.000
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	63.500.000
B	Pengelolaan Pendidikan	980.190.779.809
XI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	535.549.963.284
30	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	777.797.444
31	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	899.594.000
32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	706.767.550
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.348.488.638
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.841.183.988
35	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	582.750.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
B	Pengelolaan Pendidikan	
XI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
36	Pengadaan Mebel Sekolah	1.845.623.988
37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	376.226.038
38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.826.621.000
39	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	165.018.842.650
40	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.339.785.750
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	14.755.852.100
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	336.690.320.000
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	87.000.000
44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	42.825.000
45	Pembangunan Ruang Laboratorium	33.510.000
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	323.500.000
47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.053.275.138
XII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	410.544.863.350
48	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.444.500.000
49	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	2.789.186.850
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.019.596.750
51	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.367.500.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
B	Pengelolaan Pendidikan	
XII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
52	Pengadaan Mebel Sekolah	1.876.270.000
53	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	489.515.000
54	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	41.124.000.000
55	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	152.484.669.600
56	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.154.367.500
57	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	358.413.000
58	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.671.919.100
59	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	198.691.056.000
60	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	78.000.000
61	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.300.287.200
62	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	1.695.582.350
XIII	Pengelolaan Pendidikan Khusus	34.095.953.175
63	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	459.120.000
64	Pengadaan Mebel	840.000.000
65	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	312.500.000
66	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	300.600.000
67	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.152.000.000
68	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.349.265.675
69	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	239.852.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)
1	2	3
B	Pengelolaan Pendidikan	
XIII	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
70	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	7.237.255.500
71	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.065.700.000
72	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	64.500.000
73	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	81.100.000
74	Pembangunan Ruang Kelas Baru	937.120.000
75	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	996.000.000
76	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	615.920.000
77	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	445.020.000
C	Program Pengembangan Kurikulum	353.503.000
XIV	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	353.503.000
78	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	239.400.000
79	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	114.103.000
D	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.468.810.000
XV	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.468.810.000
80	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	583.860.000
81	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	884.950.000

- c) Program dan Anggaran APBN;
Untuk kegiatan APBN tidak ada pada Dinas Pendidikan
4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD);

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025		Faktor Penghambat / Pendorong
				Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	9
1	Berkurangnya orang miskin melalui pendidikan	Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan	Orang	300	324	Faktor pendoroang Rehabilitasi Asrama Siswa
2	Meningkatnya Akses dan layanan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Angka harapan lama sekolah	Tahun	13	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Prosentase APM SMA/K	%	76	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Prosentase Angka Partisipasi Sekolah	%	100	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Satuan Pendidikan	95	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah	%	100	99,88 %	Faktor pengahambat : masih terdapat angka putus sekolah karena lebih memilih berkerja, terlibat kenakalan remaja dan pernikahan dini
		Persentase capaian SPM Pendidikan Khusus	%	100	80,52	Faktor penghambat : Orang tua siswa masih malu untuk menyekolahkan anak berkebutuahan khusus agar masuk ke sekolah luar biasa
		Persentase Akreditasi SLB				
		Akreditasi A	%	12	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Akreditasi B	%	47	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Akreditasi C	%	25	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Akreditasi D	%	16	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Persentase Akreditasi Sekolah Menengah				

		Akreditasi A	%	43	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Akreditasi B	%	38	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Akreditasi C	%	15	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Akreditasi D	%	4	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	Sekolah	53	75	Faktor keberhasilan sudah banyak sekolah yang menjadi LSP-PI dan telah membuka jejaring LSP untuk sekolah lain
		Jumlah SMK yang melakukan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA	Sekolah	75	105	Faktor pendorong : Sekolah wajib menyelaraskan dengan kurikulum industry agar tamatan smk sdh bisa langsung masuk ke dunia kerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025		Faktor Penghambat / Pendorong
				Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	9
	Meningkatnya Akses dan layanan mutu pendidikan	Rapor pendidikan				
		Rerata kompetensi Literasi SMA	Nilai	66	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata kompetensi Numerasi SMA	Nilai	55	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata Kompetensi Literasi SMK	Nilai	63	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK	Nilai	54	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata kompetensi Literasi SDLB	Nilai	64	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	50	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB	Nilai	63	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian

		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai	57	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata kompetensi Literasi SMALB	Nilai	58	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	53	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	83	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Indeks Iklim Keamanan SMA	Nilai	89	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	Nilai	88	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Indeks Inklusivitas SMA	Nilai	86	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Indeks Iklim Keamanan SMK	Nilai	87	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	Nilai	86	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025		Faktor Penghambat / Pendorong
					Target	Capaian	
1	2		3	4	5	6	9
	Meningkatnya dan layanan pendidikan	Akses mutu	Indeks Inklusivitas SMK	Nilai	83	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Iklim Keamanan SDLB	Nilai	88	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Nilai	94	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Inklusivitas SDLB	Nilai	82	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Nilai	78	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Nilai	74	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Inklusivitas SMPLB	Nilai	83	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Iklim Keamanan SMALB	Nilai	79	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Nilai	69	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Indeks Inklusivitas SMALB	Nilai	81	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Jumlah sekolah yang merapkan kurikulum merdeka				
			SMA	Sekolah	64	638	Faktor pendorong : Sekolah wajib untuk menjalankan kebijakan kurikulum merdeka
			SMK	Sekolah	111	324	Faktor pendorong :
			SLB	Sekolah	6	41	Sekolah wajib untuk menjalankan kebijakan kurikulum merdeka
	Persentase Pendidik bersertifikat		Persentase Kualifikasi pendidik	%	99	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
			Jumlah guru SMA yang menjadi guru penggerak	Orang	285	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum

						bisa melakukan evalausi atas capaian
		Jumlah guru SMK yang menjadi guru penggerak	Orang	110	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Jumlah guru SLB yang menjadi guru penggerak	Orang	12	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian
		Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional	Orang	3	0	Faktor penghambat karena data belum tersedia sehingga belum bisa melakukan evalausi atas capaian

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Lokasi
1	2	3	4
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.848.439.239.735	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 705.180.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.600.000	Kota Palembang,
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255.000.000	Kota Palembang,
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	417.580.000	Kota Palembang,
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.838.866.056.125	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.497.154.625	Sumsel
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.243.491.500	Sumsel
6	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.000.000	Kota Palembang,
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.500.000.000	Sumsel
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	170.000.000	Kota Palembang,
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	160.660.000	Kota Palembang,
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	49.750.000	Kota Palembang,
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	516.634.260	
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	153.664.000	Kota Palembang,
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	115.600.000	Kota Palembang,
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	159.090.260	Kota Palembang,
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	88.280.000	Kota Palembang,
IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	44.000.000	
15	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	44.000.000	Kota Palembang,

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Lokasi
1	2	3	4
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.094.947.500	
16	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	205.145.000	
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	889.802.500	Kota Palembang,
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	635.210.000	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.000.000	Kota Palembang,
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.500.000	Kota Palembang,
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.210.000	Kota Palembang,
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.500.000	Sumsel
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	923.700.000	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	923.700.000	UPTD BPPK, BTIKP dan Graha
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.361.550.000	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	Kota Palembang,
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.245.200.000	Kota Palembang,
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.350.000	Kota Palembang,
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.228.461.850	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	547.920.000	Kota Palembang,
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.435.600	Kota Palembang
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.673.106.250	Kota Palembang,
X	Peningkatan Pelayanan BLUD	63.500.000	
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	63.500.000	Kota Palembang,
B	Pengelolaan Pendidikan	980.190.779.809	
XI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	535.549.963.284	
30	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	777.797.444	Sumsel

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Lokasi
1	2	3	4
B	Pengelolaan Pendidikan	979.412.982.365	
XI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	534.772.165.840	
31	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	899.594.000	Sumsel
32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	706.767.550	Sumsel
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.348.488.638	Sumsel
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.841.183.988	Sumsel
35	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	582.750.000	Sumsel
36	Pengadaan Mebel Sekolah	1.845.623.988	Sumsel
37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	376.226.038	Sumsel
38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.826.621.000	Sumsel
39	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	165.018.842.650	Sumsel
40	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.339.785.750	Sumsel
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	14.755.852.100	Sumsel
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	336.690.320.000	Sumsel
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	87.000.000	Palembang
44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	42.825.000	Sumsel
45	Pembangunan Ruang Laboratorium	33.510.000	Sumsel
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	323.500.000	
47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.053.275.138	Sumsel
XII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	410.544.863.350	
48	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.444.500.000	Sumsel
49	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	2.789.186.850	Sumsel
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.019.596.750	Sumsel

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Lokasi
1	2	3	4
B	Pengelolaan Pendidikan		
XII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
51	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.367.500.000	Sumsel
52	Pengadaan Mebel Sekolah	1.876.270.000	Sumsel
53	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	489.515.000	
54	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	41.124.000.000	Sumsel
55	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	152.484.669.600	Sumsel
56	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.154.367.500	Sumsel
57	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	358.413.000	Sumsel
58	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.671.919.100	Sumsel
59	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	198.691.056.000	Sumsel
60	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	78.000.000	Kota Palembang
61	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.300.287.200	Sumsel
62	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	1.695.582.350	Sumsel
XIII	Pengelolaan Pendidikan Khusus	34.095.953.175	
63	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	459.120.000	Sumsel
64	Pengadaan Mebel	840.000.000	Sumsel
65	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	312.500.000	
66	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	300.600.000	Sumsel
67	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.152.000.000	Sumsel
68	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.349.265.675	Sumsel
69	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	239.852.000	Sumsel
70	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	7.237.255.500	Sumsel
71	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.065.700.000	Sumsel

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Lokasi
1	2	3	4
B	Pengelolaan Pendidikan		
XIII	Pengelolaan Pendidikan Khusus	3.139.660.000	
72	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	64.500.000	Kota Palembang
73	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	81.100.000	Sumsel
74	Pembangunan Ruang Kelas Baru	937.120.000	Sumsel
75	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	996.000.000	Sumsel
76	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	615.920.000	Sumsel
77	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	445.020.000	Sumsel
C	Program Pengembangan Kurikulum	353.503.000	
XIV	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	353.503.000	
78	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	239.400.000	Sumsel
79	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	114.103.000	Sumsel
D	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.468.810.000	
XV	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.468.810.000	
80	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	583.860.000	Sumsel
81	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	884.950.000	Sumsel

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan:

- Maksud;

Pembuatan laporan adalah kegiatan menyusun informasi atau data secara sistematis, objektif, dan faktual, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan berita, pertanggungjawaban, atau temuan dari suatu kegiatan atau penelitian kepada pihak lain. Laporan berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memberikan keterangan, dasar pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban tugas yang telah dilaksanakan
- Tujuan.

Tujuan penyusunan laporan adalah menginformasikan, memandu, dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan melalui penyampaian informasi yang akurat, lengkap, dan terorganisir mengenai suatu kegiatan, peristiwa, atau topik tertentu. Laporan juga berfungsi sebagai dokumentasi, sarana pertanggungjawaban, dasar evaluasi dan analisis, serta alat komunikasi yang

dapat digunakan baik secara internal dalam suatu organisasi maupun dengan pihak eksternal

II. **EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan laporan, yang minimal meliputi:

- a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN:
 - 1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan:
 - a) Realisasi Total Belanja
Untuk anggaran tahun 2025 dari pagu 2.830.452.332.544 dan telah teralisasi sebesar Rp 1.095.551.524.069
 - b) Realisasi Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer)*, yang dibedakan dengan klasifikasi capaian realisasi antara lain sebagai berikut :
Realiasi per jenis belanja pada Dinas Pendidikan Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	304.000.000,00	92.657.000,00	30,47
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	304.000.000,00	92.657.000,00	30,47
4.1.02	Retribusi Daerah	304.000.000,00	92.657.000,00	30,47
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	304.000.000,00	92.657.000,00	30,47
	JUMLAH PENDAPATAN	304.000.000,00	92.657.000,00	30,47
5	BELANJA DAERAH	2.830.452.332.544,00	1.095.551.524.069,00	38,70
5.1	BELANJA OPERASI	2.668.025.434.028,00	1.073.656.497.771,00	40,24
5.1.01	Belanja Pegawai	1.882.915.135.025,00	903.384.162.746,00	47,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.753.605.353,00	105.173.312.754,00	20,27
5.1.05	Belanja Hibah	266.356.693.650,00	65.099.022.271,00	24,44
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.668.025.434.028,00	1.073.656.497.771,00	40,24
5.2	BELANJA MODAL	162.426.898.516,00	21.895.026.298,00	13,47
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.304.542.536,00	11.718.957.098,00	12,83
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.014.558.000,00	1.573.779.500,00	5,42
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.000.000,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.022.797.980,00	8.602.289.700,00	20,47
	JUMLAH BELANJA MODAL	162.426.898.516,00	21.895.026.298,00	13,47
	JUMLAH BELANJA	2.830.452.332.544,00	1.095.551.524.069,00	38,70

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

2. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan:
Nihil karena Dinas Pendidikan tidak ada APBN

Ket * : pilih yang sesuai

Tahun 2025 untuk APBD induk Dinas pendidikan memperoleh anggaran sebesar Rp 2.668.025.434.028 sedangkan pada saat Perubahan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pagu anggaran bertambah dengan pagu sebesar Rp 2,868,880,713,669 penambahan ini di karenakan penyesuaian terkait dana transfer pusat yaitu pagu DAK Fisik dan Non Fisik, dimana penambahan terbesar Adalah belanja pegawai yaitu belanja sertifikasi sedangkan pengurangan dana transfer pada belanja DAK Fisik yang berubah sesuai Nomor 7 Tahun 2025 adalah tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan sedangkan untuk APBD pada saat Perkada sudah dilakukan efisiensi tapi di dalam efisiensi tidak mengganggu capaian outcome dan output terkait pelayanan dimana yang dilakukan rasionalisasi Adalah belanja pendukung seperti belanja ATK, Cetak, Perjadin, narasumber, konsumsi rapat, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan, belanja pakaian lapangan, pembelian kendaraan dinas, dan belanja lainnya.

- a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang tercantum pada:
- 1) RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026; dan
 - 2) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan	Orang	300	324	108%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan digunakan untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan
		Angka rata - rata lama sekolah	Tahun	8,57	8,91	104%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	
		Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,67	12,65	99,84%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Faktor menurun ini karena faktor ekonomi, dan akses pendidikan yang tidak merata, saat ini Dinas Pendidikan sedang berbenah mengintervensi anak anak miskin tetap melanjutkan dengan pembiayaan dr daerah dan melakukan pemerataan pendidikan
		APM Sekolah Menengah	%	75,72	69,56	92%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Masih kurangnya daya tampung, masih ada sswa yang putus sekolah karena biaya
		Angka Partisipasi sekolah (APS)	%	100	0	0%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	95	116	122%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Terdapat Pergub inklusi dimna sekolah umum wajib menerima anak berkebutuhan khusus
		Jumlah SMK pusat keunggulan	Sekolah	35	50	143%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Semakin meningkatnya kualitas dan mutu sekolah
		Jumlah sekolah penggerak SMA	Sekolah	70	75	107%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Semakin meningkatnya kualitas dan mutu sekolah
		Jumlah sekolah penggerak SLB	Sekolah	6	6	100%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Semakin meningkatnya kualitas dan mutu sekolah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Program/Kegiatan	Kegiatan	Penghambat/Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah	%	100	99,88	99,88%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Faktor pengahambat : masih terdapat angka putus sekolah karena lebih memilih berkerja, terlibat kenakalan remaja dan pernikahan dini
		Persentase capaian SPM Pendidikan Khusus	%	100	80,52	80,52%	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Faktor penghambat : Orang tua siswa masih malu untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khusus agar masuk ke sekolah luar biasa
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Akreditasi SLB							
		Akreditasi A	%	12	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Akreditasi B	%	47	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Akreditasi C	%	25	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Akreditasi D	%	16	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Persentase Akreditasi Sekolah Menengah							
		Akreditasi A	%	43	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Akreditasi B	%	38	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Akreditasi C	%	15	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Akreditasi D	%	4	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Program/Kegiatan	Kegiatan	Penghambat/Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Akreditasi SLB							
		Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	Sekolah	53	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Jumlah SMK yang melakukan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA	Sekolah	75	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata nilai rapor mutu pendidikan							
		Rata-rata Nilai kompetensi Literasi SMA	Nilai	65,52	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata Nilai kompetensi Numerasi SMA	Nilai	55,28	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata Nilai Kompetensi Literasi SMK	Nilai	63,36	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata Nilai Kompetensi Numerasi SMK	Nilai	53,9	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata Nilai kompetensi Literasi SDLB	Nilai	63,79	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata Nilai kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	49,51	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Program/Kegiatan	Kegiatan	Penghambat/Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan								
		Rata-rata Nilai kompetensi Literasi SMPLB	Nilai	63,46	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
3	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Rata-rata Nilai kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai	57,43	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata Nilai kompetensi Literasi SMALB	Nilai	58,46	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Rata-rata Nilai kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	53,37	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai	82,54	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	79,05	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Keamanan SMA	Nilai	88,59	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	Nilai	87,91	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Inklusivitas SMA	Nilai	85,77	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Program/Kegiatan	Kegiatan	Penghambat/Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan								
		Indeks Iklim Keamanan SMK	Nilai	86,99	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	Nilai	86,28	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Inklusivitas SMK	Nilai	83,21	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	Nilai	87,53	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Nilai	93,97	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Inklusivitas SDLB	Nilai	82,35	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Nilai	78,41	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Nilai	73,81	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Inklusivitas SMPLB	Nilai	83,21	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Program/Kegiatan	Kegiatan	Penghambat/Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan								
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	Nilai	79,22	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Nilai	68,64	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Indeks Inklusivitas SMALB	Nilai	80,88	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		Jumlah sekolah yang merapkan kurikulum merdeka							
		SMA	Sekolah	64	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		SMK	Sekolah	111	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
		SLB	Sekolah	6	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen biasanya data akan keluar setelah assesmen nasioanal
	Persentase Pendidik bersertifikat	Persentase Kualifikasi pendidik	%	99	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen
		Jumlah guru SMA yang menjadi guru penggerak	Orang	285	0	0	Peogram Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan pendidikan Khusus	Belum bisa membandingkan capaian karena menunggu data dari Kemendikdasmen

- b) Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah;
- c) dst.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala

1. Refocusing anggaran
2. Belanja BOS belum bisa dianggap realisasi karena membutuhkan rekonsiliasi Belanja dengan sekolah dan BPKAD
3. Ketidak jelasan realisasi belanja Sertifikasi karena salur langsung ke masing masing individu

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Refocusing anggaran harus melihat atas Fungsi belanja terutama pada Dinas Pendidikan
2. Percepatan rekonsiliasi belanja Bos
3. KPPN harus menyampaikan total realisasi atas salur Sertifikasi

IV. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan, memang capaian realisasi belum maksimal baik keuangan maupun realisasi kinerja hal ini dikarenakan banyak kendala yang dialami baik terkait perubahan nomenklatur atas dana transfer pusat, kami meyakini diakhir triwulan IV seluruh capaian akan lebih maksimal